

# RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

PEMERINTAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG  
TAHUN 2021


## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Gubernur selaku Kepala Daerah wajib menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah pusat melalui media cetak/media online, papan pengumuman yang mudah diakses publik dan website resmi pemerintah daerah.

RLPPD memuat capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar, hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah, dan inovasi daerah.

Penyampaian RLPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 ini merupakan salah satu bentuk transparansi penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat diperoleh saran dan masukan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang lebih baik kedepannya.

Pangkalpinang, Maret 2022

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  
  
ERZALDI ROSMAN

## A. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Indeks Pembangunan manusia	Angka Kemiskinan	Angka Pengangguran
<b>71,69</b> Poin (meningkat 0,31% dibandingkan tahun 2020)	<b>4,67</b> % (menurun 0,45% dibandingkan tahun 2020)	<b>5,03</b> % (menurun 4,19% dibandingkan tahun 2020)
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>Pendapatan Per-Kapita</b>	<b>Ketimpangan Pendapatan</b>
<b>5,05</b> % (meningkat 52,11% dibandingkan tahun 2020)	<b>58,34</b> Juta/Tahun (meningkat 12,18% dibandingkan tahun 2020)	<b>0,247</b> (menurun 3,52% dibandingkan tahun 2020)

## B. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Urusan	Indikator	Capaian
<b>Pendidikan</b>	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	86,55817
	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	76,94301
<b>Kesehatan</b>	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	0,238048
	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100
	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100
<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	3,925056
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	15,29782
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	24,18702
	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang	0

	memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota		
	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	0	
	Rasio kemantapan jalan	95,87304	
	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yg dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	77,34864	
<b>Perumahan Rakyat</b>	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yg layak huni	0	
	Persentase Luas kawasan kumuh 10 & ndash; 15 Ha yang ditangani	0	
	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	0,511509	
	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100
		Persentase Perda dan Perkada & nbsp; yang ditegakkan	100
Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal		100	
Persentase penanganan pra bencana		42,85714	
Persentase penanganan tanggap darurat bencana		100	
<b>Sosial</b>		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	146,6667
	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	185,7143	
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	110	
	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	0	
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100	

**C.OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA**

Mendapatkan Opini BPK  
**4 kali “WTP”**  
berturut - turut sejak tahun 2017-2020

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, menurut Opini BPK RI, Laporan Keuangan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified Opinion*), laporan keuangan yang tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 31 Desember 2020 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan serta ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

**D.RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH**

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021
<b>2.71 T</b>	<b>2.47 T</b>

**E.INOVASI DAERAH (Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2020)**

NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI
<b>MERONA CERIA</b> (Meraih Provinsi Layak Anak Dengan Cepat Melalui Kartu Identitas Anak)	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah
<b>PLAT BN</b> (Program Layanan Terpadu Bebas Nyeri)	Inovasi Pelayanan Publik
<b>SAMSAT SETEMPOH</b>	Inovasi Pelayanan Publik
<b>E-KINERJA</b>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
<b>FUEL CARD</b> (Sistem Distribusi BBM Solar Bersubsidi)	Inovasi Pelayanan Publik
<b>SIM-DIKLAT</b> (Sistem Manajemen Diklat)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
<b>SIMADIG</b> (Sistem Informasi Arsip Digital)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
<b>KAMPUNG KELUARGA CIKAR</b> (Cerdas, Inovatif, Kreatif, Aktif dan Responsif)	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah
<b>SI KELESAN</b> (Sistem Informasi Kendali dan Layanan Kemasan)	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah
<b>SI CENTING</b> (Siap Cegah Stunting)	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah
<b>SEKOLAH PEREMPUAN SEKUNTUM MELATI</b>	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah
<b>SISI DUKA</b> (Sistem Informasi Terintegrasi Dunia Kerja Dengan Alumni SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah
<b>PROBAKAT</b> (Program Rujukan Balik Menggunakan Aplikasi Telegram)	Inovasi Pelayanan Publik
<b>KAMPUNG SIBEMA</b> (Kampung Sinergi Bebas Malaria)	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

**Format Masukan**

Kolom Penyampaian Saran dan Masukan dari Masyarakat Terhadap Ringkasan LPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

Terhadap RLPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 disampaikan saran/masukan sebagai berikut:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

**Catatan:**

Saran/masukan dapat dikirim melalui Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui email: [otdababel@yahoo.com](mailto:otdababel@yahoo.com)